

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Minapolitan dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar

Kawasan pesisir merupakan daerah darat tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air laut. Kawasan pesisir memiliki sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Tingginya nilai sumber daya alam dan nilai strategis kawasan menjadikan kawasan pesisir sangat memungkinkan untuk dikembangkan berbagai kegiatan, selain itu konflik pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir perlu mendapat perhatian yang intensif untuk mengurangi berbagai permasalahan yang timbul berdasarkan hal tersebut.

Untuk memajukan infrastruktur suatu kawasan pesisir dengan mempertimbangkan potensi laut, pemerintah melakukan suatu kebijakan untuk membuat suatu kawasan dengan konsep Minapolitan, dimana konsep ini dikembangkan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian lokal, aktivitas Minapolitan tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan, tetapi juga sektor lain seperti industri kecil, pariwisata, pendidikan, jasa pelayanan dan lain-lain.

Minapolitan yang berasal dari kata mina berarti ikan dan politan berarti polis atau kota, secara bebas dapat diartikan sebagai kota perikanan. Pengembangan konsep Minapolitan dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh layaknya sebuah kota.

Terwujudnya suatu kawasan minapolitan harus memenuhi persyaratan terwujudnya kawasan minapolitan, persyaratan tersebut diantaranya adalah :

1. Komitmen daerah berupa kontribusi pembiayaan, personil dan fasilitas pengolahan dan pengembangan
2. Memiliki komoditas unggulan kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomis tinggi dan sangat besar;
3. Letak lokasi minapolitan strategis dan memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan;
4. Kesesuaian dengan Renstra, RTRW dan RPIJMD

5. Terdapat unit produksi, pengolahan, pemasaran dan usaha terkait sebagai pendukung;
6. Memiliki fasilitas pendukung seperti pasar, penyediaan permodalan, prasarana produksi, pengolahan, pemasaran kelembagaan usaha, serta fasilitas penyuluhan dan pelatihan.
7. Kelayakan lingkungan yang diukur berdasarkan daya dukung lingkungan
8. Keberadaan Kelembagaan wilayah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan;
9. Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memfokuskan pengembangan program kawasan minapolitan percontohan yang terdapat di 41 daerah yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun 2011. Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, pengembangan minapolitan ini meliputi 9 lokasi berbasis perikanan tangkap, 24 lokasi minapolitan berbasis perikanan budidaya, dan 8 lokasi sentra garam. Kesembilan minapolitan percontohan berbasis perikanan tangkap terletak di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPS) Cilacap, PPN Tamperan, PPP Muncar, PPN Ternate, PPN Sungai Liat, PPS Belitung, PPS Belawan, dan PPN Ambon.

Salah satu pelabuhan ikan yang dijadikan kawasan Minapolitan berbasis perikanan tangkap adalah Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Keputusan ini telah ditetapkan oleh Bupati Banyuwangi No. 188/852/KEP/429.011/2010 tentang penetapan lokasi Minapolitan di Kabupaten Banyuwangi. Kawasan ini memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat tinggi untuk dikembangkan. Dimana Muncar merupakan penghasil ikan terbesar di Jatim dan produksi ikan tahun 2010 sebesar 27.748 ton. Hasil tangkap ikan di Muncar didukung sekitar 90-an unit pabrik pengolahan dan pengalengan ikan yang berdiri sejak tahun 70-an. Hasilnya tidak hanya dijual di Banyuwangi dan kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga diekspor ke manca negara, baik dalam bentuk ikan mentah maupun ikan olahan, termasuk ikan dalam kaleng dengan merek-merek terkenal yang biasanya dijumpai di supermarket. Produksi ikan olahan diekspor ke Eropa, Jepang, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan Kanada sebanyak 1.562.249,72 kg per bulan dengan nilai uang sebesar Rp 19.528.121.500. (*Desk Informasi, 31 May 2011*).

Untuk menjadikan Muncar sebagai kawasan minapolitan, kawasan ini dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah darat dan wilayah laut. Wilayah darat tersebut dibagi menjadi tujuh zona diantaranya adalah Zona Perikanan Budidaya, Zona Industri, Zona PPP Muncar, Zona Permukiman, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Pertanian dan Perkebunan, dan zona Ruang Terbuka Hijau.

Zona PPP Muncar merupakan salah satu urat nadi dari kegiatan kelautan dan perikanan yang ada di Kawasan Minapolitan Muncar, kondisi yang ada sekarang, PPP Muncar hampir tidak dapat menampung seluruh kapal yang ada sehingga ke depannya perlu ada pembenahan, pengembangan dan peningkatan kapasitas daya tampung pelabuhan. Berdasarkan peta wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan (WKOPP)-PPP Muncar, maka zona pelabuhan dibagi menjadi beberapa sub zona diantaranya sub zona wilayah operasional darat (WOD) , wilayah kerja darat (WKD), wilayah kerja laut (WKL) dan wilayah operasional laut (WOL).

Selain kurangnya daya tampung pelabuhan, pada saat ini kawasan pelabuhan Muncar kurang memadai fasilitas yang nantinya akan menunjang terwujudnya kawasan minapolitan. Kawasan ini terdapat pada sub zona wilayah kerja laut (WKL) dan wilayah kerja darat (WKD), yang beroperasi di dalam kawasan PPP. Kawasan ini perlu adanya fasilitas penunjang yang dapat memfasilitasi kegiatan di kawasan tersebut. Kawasan ini hanya memiliki beberapa fasilitas, dan fasilitas di kawasan pelabuhan ini masih belum layak menjadi syarat terbentuknya kawasan Minapolitan yang sehat, seperti yang telah dijelaskan pada persyaratan kawasan Minapolitan poin ke lima yaitu didalam suatu kawasan pelabuhan harus terdapat unit produksi, pengolahan, pemasaran dan usaha terkait sebagai pendukung. Sedangkan pada pelabuhan perikanan tempat pengolahan dan tempat produksi kondisinya sudah rusak. Sehingga perlu dibangun fasilitas-fasilitas sebagai penunjang, diantaranya adalah pasar ikan, pujasera, perkantoran, pusat logistik, tempat ibadah, tempat pelelangan, taman rekreasi, dan beberapa fasilitas lain yang dapat memperlancar aktifitas dalam pelabuhan. Selain penyediaan fasilitas tersebut, perlu adanya penataan penataan kawasan yang lebih baik.

Berdasarkan data mengenai rencana penataan zoning PPP Muncar yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, PPP Muncar dikembangkan untuk beberapa fasilitas diantaranya pos jaga, pasar ikan, rumah dinas, masjid, pemandian umum, balai pengobatan, kantor dept. Blambangan, kantor PLN, kantor satuan polisi AIRUD, rumah dinas satuan polisi AIRUD, kantor cabang DKP

dan kantor administrasi, pujasera dan warung lesehan, IPAL, rumah genset, tendon, gudang, warung makan, parker motor, zona pengembangan industri, ruko, docking kapal, slipway, dermaga beton, SPBN, parkir_pusat, TPI, *transit sheet*, TPA, cold storage, pabrik es, penjemuran ikan, tempat hasil jemur ikan, penjemuran jaring ikan, kolam labuh lama, kolam labuh baru, break water dan industri pengolahan ikan.

Pada wilayah Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar ini, selain masalah fasilitas yang kurang memadai aktifitas dalam pelabuhan, pencemaran lingkungan juga menjadi salah satu masalah diantaranya terdapat pasar ikan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta tempat penjemuran. Pada tempat-tempat tersebut proses pembuangan limbah hasil produksi di buang langsung ke selokan yang mengarah ke sungai, proses pembuangan telah dilakukan bertahun-tahun. Sehingga pada wilayah ini terjadi pencemaran dan terlihat kumuh, dan beberapa dampak lainnya, diantaranya adalah:

1. Adanya pencemaran kualitas air permukaan dan air tanah.
2. Adanya pencemaran kualitas udara (bau).
3. Adanya dampak terhadap kehidupan biota air.
4. Adanya dampak terhadap estetika lingkungan.

1.1.2 Pelabuhan Perikanan dengan Pendekatan Ekologi-Teknik

Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) IPB Prof.Dr.Ir Tridoyo Kusumastanto,MS., menyatakan perlunya pelabuhan berwawasan ekologi, yang mengarahkan agar jangan sampai pembangunan di kawasan pesisir, termasuk didalamnya pembangunan untuk pelabuhan, berbenturan dengan keberlanjutan pembangunannya.

Dalam mendesain fasilitas pelabuhan ini perlu memperhatikan aspek ekologi secara teknik, dimana aspek ekologi-teknik sangat penting dipertimbangkan dalam penataan kawasan pelabuhan. Hal ini berkaitan dengan karakteristik wilayah pesisir dan laut yang relatif peka terhadap gangguan lingkungan akibat pengembangan kegiatan kelautan dan perikanan yang kurang bijaksana. Ekosistem pesisir harus tetap dipertahankan agar pemanfaatan ruang di atasnya tidak mengganggu keseimbangannya.

Pendekatan pada perancangan kawasan ini menggunakan pendekatan ekologi-teknik, karena dengan menggunakan pendekatan ekologi-teknik saat mendesain,

terdapat beberapa aspek yang diperhatikan dalam mendesain, serta memperhatikan dan menjaga keberlanjutan kawasan tersebut menjadi kawasan yang ramah dan peduli terhadap lingkungan. Beberapa aspek tersebut dilihat dari kondisi kawasan pelabuhan itu sendiri, misalnya kondisi udara, iklim, sistem pembuangan limbah yang ramah terhadap lingkungan serta beberapa aspek lain yang memperhatikan lingkungan.

Dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pelabuhan dengan konsep ekologi-teknik, di harapkan pelabuhan perikanan ini menjadi kawasan percontohan Minapolitan berkonsep ekologi di Indonesia. Selain hal tersebut, Melalui penerapan konsep ekologi-teknik tersebut, diharapkan dapat menjadi kawasan pelabuhan perikanan yang ekologis, ramah terhadap lingkungan, serta dapat mengurangi pencemaran terhadap pantai.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pendekatan masalah di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pelabuhan perikanan Muncar kurang memadai fasilitas yang nantinya akan menunjang terwujudnya kawasan Minapolitan;
2. Perlunya penataan kawasan pelabuhan perikanan yang lebih baik, untuk memperlancar pengembangan kawasan Minapolitan;
3. Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar memiliki tingkat pencemaran yang cukup tinggi, sehingga perlunya pendekatan ekologi secara teknis pada kawasan pelabuhan untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

1.3 Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam kajian-perancangan ini adalah bagaimana rancangan fasilitas pelabuhan perikanan berkonsep ekologi-teknik di kawasan Minapolitan Muncar-Banyuwangi

1.4 Batasan Masalah

Sesuai dengan tujuan kajian-perancangan, agar kajian-perancangan ini lebih mudah perlu adanya batasan-batasan sebagai berikut :

1. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Muncar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur;

2. Penzoningan pelabuhan didasarkan pada tata massa pelabuhan dan konsep Minapolitan yaitu bangunan yang saling berintegrasi satu sama lain;
3. Tapak berada pada kawasan sub zona Wilayah Kerja Darat (WKD) dan Wilayah Kerja Laut (WKL) Pelabuhan Perikanan Muncar, karena WKD dan WKL sebagai pusat dari kawasan pelabuhan tersebut;
4. Perancangan kawasan ini melalui pendekatan ekologi, ekologi yang dikaji sebagai metode perancangan adalah ekologi secara teknik, yaitu ekologi yang berhubungan dengan arsitektur secara fisik, misalnya pemilihan bahan material, orientasi, organisasi bangunan, dan tata masa pada pelabuhan perikanan abik secara tapak maupun pada bangunan
5. Lingkup kajian yang dikaji adalah lingkup tapak dan lingkup bangunan,

1.5 Tujuan

Tujuan dari kajian perancangan ini adalah menghasilkan rancangan fasilitas pelabuhan perikanan berkonsep ekologi-teknik di Kawasan Minapolitan Muncar-Banyuwangi sehingga tercipta kawasan pelabuhan yang ramah terhadap lingkungan.

1.6 Manfaat

Pemanfaatan kajian perancangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Akademisi
 - a. Untuk pengembangan keilmuan tentang arsitektur ekologi-teknik;
 - b. Mahasiswa dapat mengetahui tentang kajian perancangan kawasan minapolitan pada zona pelabuhan
2. Masyarakat
 - a. Menyediakan fasilitas pelabuhan perikanan kepada masyarakat dan nelayan;
 - b. Memperlancar aktifitas dan kegiatan dalam produksi hasil ikan.
3. Instansi terkait
 - a. Kawasan pelabuhan Muncar lebih tertata;
 - b. Mengembangkan Kawasan Pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
 - c. Menjadi percontohan kawasan minapolitan berbasis ekologi di Indonesia.
4. Manfaat bagi lingkungan

Sistem pembuangan limbah lebih diperhatikan, sehingga kawasan pelabuhan menjadi lebih bersih.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dengan judul Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Berkonsep Ekologi-Teknik di Kawasan Minapolitan Muncar-Banyuwangi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan Masalah, tujuan, manfaat bagi akademisi, masyarakat , manfaat bagi instansi terkait, serta manfaat bagi lingkungan, kerangka teori serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi acuan/referensi yang menjadi dasar teori dalam analisis dan evaluasi penulisan skripsi. Teori tersebut adalah teori tentang kawasan pesisir, Minapolitan, pelabuhan perikanan, dan Ekologi. Dengan hasil yang didapatkan berupa parameter ekologi pada setiap fasilitas pelabuhan perikanan.

BAB III METODE KAJIAN PERANCANGAN

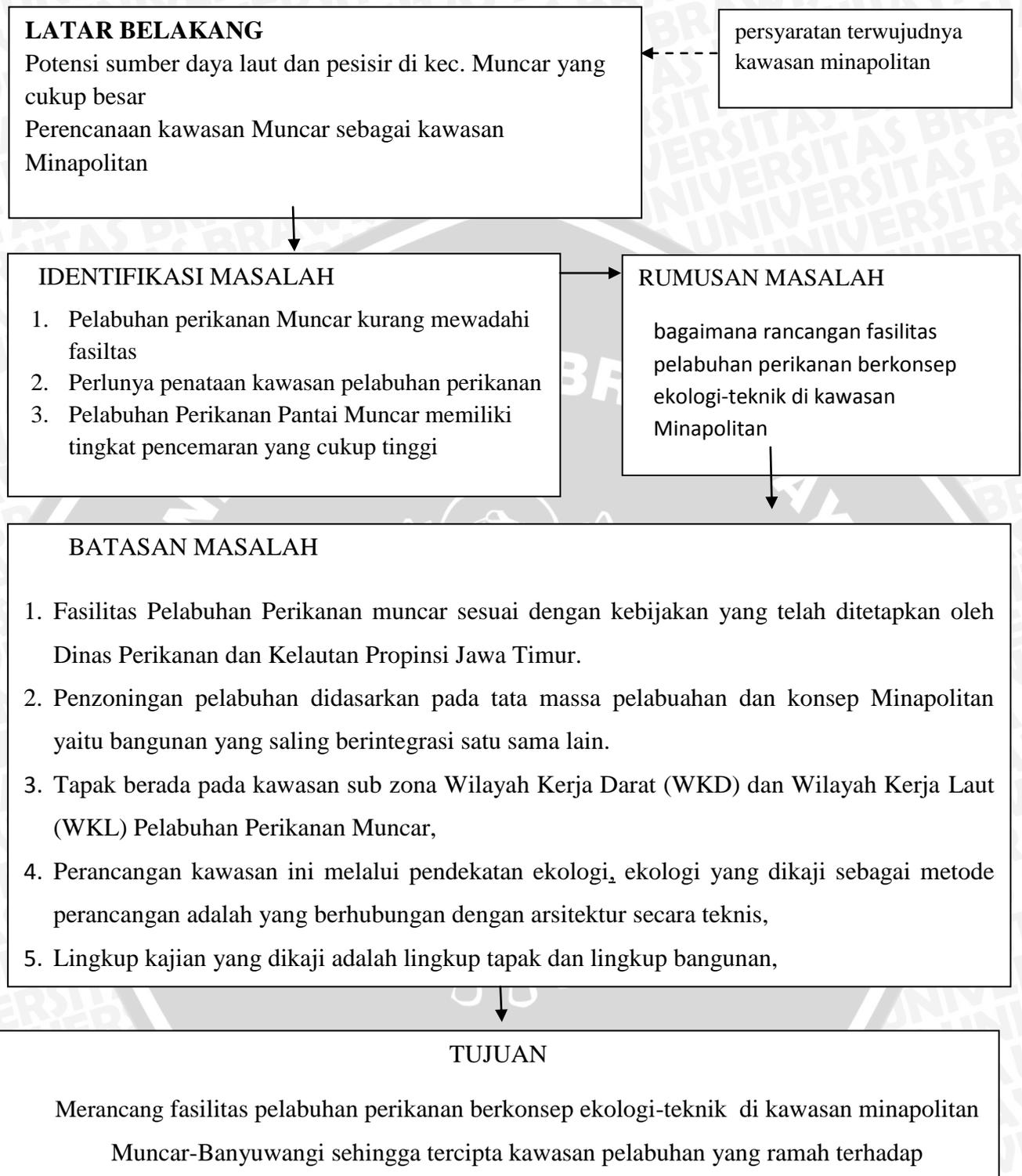
Bab ini berisi tentang tahapan-tahapan yang digunakan dalam penyelesaian skripsi lengkap dengan bagan alir penyelesaian skripsi. Pada tahap ini hal, yang dilakukan adalah mengumpulkan data, menganalisa dan mensintesa data, metode perancangan, dan pembahasan dan kesimpulan. Yang diakhiri dengan bagan alir penyelesaian skripsi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang tinjauan tapak, tinjauan objek, tinjauan terdahulu, analisa, konsep, dan pembahasan hasil desain. Pada tahap analisa hal-hal yang dianalisa berupa analisa fungsi, aktifitas dan pelaku, serta menganalisa eko-teknik berupa analisa organisasi bangunan, pencahayaan, penghawaan, sanitasi, serta material dalam skala tapak maupun dalam dalam skala bangunan. Pada tahap berikutnya adalah menentukan konsep dari setiap parameter yang telah dibuat, yang nantinya berfungsi untuk mendesain fasilitas pelabuhan. dan pada tahap terakhir pada bab ini adalah membahas hasil desain skala tapak dan bangunan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran – saran tentang hasil yang didapatkan dari hasil skripsi.



Gambar 1.1 Kerangka pemikiran